

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2017, tepatnya tanggal 20 Juli 2017 terdapat perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang pernah terlibat dalam praktik kecurangan yaitu perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang beroperasi di sektor makanan dan minuman. Dua afiliasi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu PT Indo Beras Unggul dan PT Jati Sari Rezeki diduga melakukan praktik kecurangan dalam menjual beras dengan memproduksi beras subsidi dari petani menjadi beras premium olahan dan dikemas ulang. Hal tersebut menyebabkan menurunnya saham perusahaan sehingga manajemen perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2017 yaitu manipulasi laporan laba rugi. Pada tahun 2018, pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pemegang saham mempertanyakan mengenai laporan keuangan tersebut, sehingga melakukan audit ulang untuk melakukan laporan keuangan 2017 dengan Ernst & Young Indonesia (EY). Setelah dilakukan audit ulang, ditemukan bahwa terdapat praktik manipulasi yang didasari oleh manajemen perusahaan, yaitu direktur utama perusahaan, beberapa direktur lainnya dan beberapa anggota departemen akuntansi perusahaan telah dijatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya manipulasi laporan keuangan tersebut tentu berdampak terhadap investor yang menanamkan

sahamnya pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Pastinya ayng terjadi yaitu merosotnya harga saham, bahkan harga saham tersebut turun lebih dari 50% dari harga tertinggi tahun sebelumnya. Kepercayaan investor terhadap perusahaan hilang akibat terjadinya manipulasi laporan keuangan ini, sehingga mempersulit perusahaan untuk mendapatkan investasi di masa depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menjatuhkan sanksi administratif pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, berupa pembekuan aset perusahaan dan pencabutan izin usaha. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk juga wajib membayar denda sebesar Rp 1,2 miliar. Akibat dari sanksi - sanksi tersebut perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk diwajibkan untuk mengembalikan dana investor yang telah ditarik sebelum penipuan ditemukan. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, dewan direksi, dewan komisaris serta auditor yang memeriksa laporan keuangan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana investor secara penuh.

Hal yang berbeda jika dibandingkan dengan Pandemi Covid-19 lima tahun lalu, menyebabkan kendala di seluruh dunia dengan adanya kebijakan *lockdown* sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan *lockdown* berdampak besar terhadap seluruh sektor terutama dalam sektor ekonomi, pendidikan dan sosial Kusumaputra & Retnowati Kusumaputra & Retnowati (2020), salah satu sektor yang berdampak signifikan dari adanya Covid-19 adalah sektor manufaktur. Industri manufaktur memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, khususnya di pasar modal melalui perannya di Bursa Efek Indonesia.

Pernyataan Menteri Perindustrian menjelaskan industri manufaktur diharapkan salah satu penggerak perubahan ekonomi pasca pandemi. Menurut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun 2020 posisi saham belum mampu pulih di posisi semula atau sebelum munculnya Covid-19, temuan ini sejalan dengan penelitian Aglia & Rousilita Suhendah (2023) terdapat penurunan yang signifikan harga saham sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 dapat disebabkan karena terdapat tekanan dari berbagai faktor ekonomi dan juga kebijakan pemerintah yang menyebabkan timbulnya penurunan terhadap harga saham di pasar saham selama Covid-19 yaitu *work from home*. Temuan Aglia & Rousilita Suhendah (2023) menguatkan hipotesis bahwa struktur kepemilikan memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi guncangan eksternal. Penurunan harga saham selama masa pandemi menggambarkan bahwa badan usaha yang memiliki struktur kepemilikan yang kokoh dapat beradaptasi dalam situasi krisis. Fenomena lemahnya tata kelola perusahaan tidak hanya muncul akibat krisis pandemi atau manipulasi di dalam negeri, tetapi juga telah terbukti secara global sebagaimana terlihat dari kasus Enron dan WorldCom.

Kasus skandal korporasi yang terjadi pada Enron Corporation dan WorldCom menjadi contoh nyata dampak buruk dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang tidak efektif. Enron Corporation mengalami kebangkrutan pada tahun 2001, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Skandal Enron memicu perhatian publik

karena perusahaan tersebut memanipulasi laporan keuangan dengan menggunakan metode *Mark to Market Accounting*, yaitu menilai aset perusahaan berdasarkan nilai pasar dan bukan dari biaya perolehan. Hal ini menyebabkan peningkatan nilai aset dicatat sebagai pendapatan oleh Enron, padahal pendapatan tersebut belum benar – benar direalisasikan.

Enron juga bekerja sama dengan entitas khusus yang disebut *Special Purpose Entities* (SPEs), di mana aset – aset Enron dijual kepada SPEs walaupun sebenarnya masih berada dalam kendali Enron. Transaksi ini memungkinkan Enron mencatat hasil penjualan sebagai pendapatan dan menyembunyikan sejumlah besar utang dari neraca keuangan mereka. Kasus Enron membuktikan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dapat mengalami kegagalan besar yang berdampak luas, termasuk kehilangan kepercayaan investor.

Kasus lain yang juga menggemparkan dunia adalah WorldCom, yang mengungkapkan telah melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian sebesar \$3,8 miliar. WorldCom melakukannya dengan acara mengurangi biaya operasional dan meningkatkan investasi modal secara tidak wajar. Akibat manipulasi tersebut, WorldCom mengalami kebangkrutan pada tahun 2002 yang merugikan ribuan karyawan dan investornya. Kedua kasus besar ini menunjukkan dampak serius dari penerapan Good Corporate Governance yang buruk, di mana

rendahnya nilai perusahaan mencerminkan adanya masalah mendasar dalam kinerja dan integritas perusahaan.

Nilai perusahaan yang merosot akan menimbulkan tidak maksimalnya pengambilan keputusan sehingga kinerja keuangan perusahaan juga tidak maksimal. Nilai perusahaan yang tinggi artinya terdapat kerja sama yang baik antara manajer perusahaan dan para pemegang saham, namun sebaliknya jika nilai perusahaan yang rendah maka tidak adanya kerja sama yang baik antara manajer dan para pemegang saham.

Terwujudnya nilai perusahaan yang optimal sangat bergantung pada kolaborasi yang aktif dan efektif antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan, dengan penekanan khusus pada pemegang saham proses pengambilan keputusan yang strategis. Keputusan yang diambil manajer sesuai dengan pihak lain maka akan berjalan sesuai, kebalikannya jika manajer lebih mementingkan keputusan pribadi maka nilai perusahaan akan turun. Dengan demikian dapat mengakibatkan depresiasi penilaian perusahaan dan mempengaruhi harga saham.

Harga saham merupakan cerminan dari nilai intrinsik suatu perusahaan. Kenaikan harga saham dapat lebih diminati oleh investor dalam membeli saham di perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika nilai perusahaan menurun harga saham juga akan tertekan. Fluktuasi harga saham yang signifikan dapat memicu ketidakstabilan pasar dan merugikan investor, disisi lain investor pasti akan mempertimbangkan rasio keuangan ketika

memperoleh ekuitas, rasio tersebut untuk menilai kinerja keuangan perusahaan.

Evaluasi kinerja keuangan perusahaan merupakan aspek krusial dalam dunia bisnis. Salah satu cara untuk mengukur efisiensi penggunaan modal oleh perusahaan adalah rasio *Return On Assets* (ROA). Menurut Mardiyanto (dalam (Wijaya, 2019), jika metrik pengembalian aset (ROA) menunjukkan nilai substansial, menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan keuntungan, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk memperoleh laba.

Return On Assets atau yang disingkat dengan ROA memberikan gambaran bagaimana aktivitas pembelanjaan modal perusahaan untuk aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam usahanya untuk mencari keuntungan. ROA dapat digunakan sebagai alat evaluasi perusahaan untuk meningkatkan pengembalian investasi aset melalui perbaikan operasional. Dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan senantiasa berupaya untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal. Laporan keuangan sebagai cerminan kondisi keuangan suatu perusahaan, menjadi acuan utama bagi *stakeholder* dalam membuat keputusan investasi, pembiayaan, atau menjalin kerja sama. Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Penerapan GCG yang optimal dapat mencerminkan komitmen perusahaan terdapat prinsip akuntabilitas, transparansi, dan independensi

dalam pengelolaannya, sehingga mampu mengurangi risiko terjadinya praktik manipulatif atau kecurangan dalam pelaporan akuntansi. Untuk menilai seberapa efektif perusahaan dapat menghasilkan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, diperlukan *Good Corporate Governance* yang baik menjadi faktor utama yang memengaruhi hasil kualitas kinerja keuangan, yang dapat diukur oleh para pemangku kepentingan.

Kinerja keuangan merupakan indikator utama yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi, dengan demikian kinerja keuangan yang kuat merupakan komponen penting dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Dalam lingkup pasca pandemi, lanskap persaingan bagi bisnis menjadi semakin sulit, akibatnya tidak hanya fokus pada memaksimalkan laba perusahaan tetapi berfokus juga pada kualitas pengelolaan perusahaan melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Menurut Syofyan (2021) GCG yang efektif dianggap dapat meningkatkan kinerja keuangan bisnis dengan beberapa cara. Pertama, penerapan GCG yang efektif mampu menekankan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajemen serta meningkatkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua, GCG yang efektif dapat menciptakan struktur manajemen yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, yang pada gilirannya meningkatkan nilai perusahaan.

Maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia, implementasi prinsip - prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi subjek pengawasan yang selektif. Kejadian ini menekankan pentingnya corporate governance yang kuat sebagai perlindungan utama terhadap tindakan yang merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan. Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai regulator pasar modal telah berupaya keras mendorong perusahaan-perusahaan publik, termasuk perusahaan manufaktur untuk mengadopsi GCG secara menyeluruh. Namun, implementasi GCG di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Perusahaan manufaktur, sering kali beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks. Persaingan yang ketat, tekanan untuk mencapai target produksi, serta tuntutan konsumen yang semakin tinggi membuat perusahaan harus bergerak cepat dan adaptif.

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia masih menjadi tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utamanya adalah kondisi internal perusahaan yang tidak proporsional. Praktik-praktik korporasi yang tidak transparansi, tidak berkelanjutan, dan tidak adil sering kali menjadi penghalang utama dalam implementasi GCG yang efektif. Contohnya, fokus yang berlebihan dari dewan direksi dan manajemen pada pencapaian target jangka pendek dapat mengabaikan kepentingan jangka panjang perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang fokus untuk mencapai target dalam waktu singkat dapat mengabaikan aspek-aspek penting seperti lingkungan dan sosial. Kondisi tersebut

berpotensi merusak reputasi perusahaan serta menurunkan kepercayaan dari para investor. Perusahaan dapat mengalami masalah di masa depan akibat dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab, maka pemegang saham akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Kehilangan kepercayaan investor dapat berakibat pada penurunan nilai saham, ataupun kesulitan mendapatkan pendanaan. Oleh karena itu, kepercayaan investor sangat bergantung pada bagaimana perusahaan tersebut dikelola, terutama dalam kaitannya dengan dewan direksi. Dewan direksi menempati posisi penting dalam pengambilan keputusan strategis.

Otoritas Jasa Keuangan (2014), dewan direksi adalah bagian penting dari struktur perusahaan. Dewan direksi memiliki wewenang dan akuntabilitas yang komprehensif untuk manajemen, khususnya sejalan dengan tujuan entitas itu sendiri. Keberhasilan manajemen perusahaan dan peningkatan kinerja keuangan dipengaruhi secara langsung oleh direktur. Berdasarkan anggaran dasar, dewan komisaris menyarankan direksi untuk melakukan pengawasan khusus dan umum sebaik mungkin. Untuk menghindari konflik antara manajemen dan pihak berwenang, dewan komisaris memiliki kewajiban untuk menyusun komite audit agar meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Diharapkan keberadaan komite audit akan berdampak positif, terutama dalam hal pengawasan, karena tugas mereka adalah memeriksa secara menyeluruh informasi finansial dalam laporan keuangan perusahaan Yulianti & Cahyonowati (2023)

Selain dewan direksi terdapat komponen lain yang mempengaruhi GCG, yaitu dewan komisaris. Peran dewan komisaris dalam perusahaan sangat krusial karena tanggung jawab utamanya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* yaitu memastikan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip GCG diterapkan dalam perusahaan. Menurut Febrina & Sri (2022) apabila dewan direksi menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, maka dapat menghasilkan yang menguntungkan pada kinerja keuangan dan meningkatkan kepuasan pemegang saham

Sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG), Bursa Efek Indonesia berusaha untuk mempromosikan penerapan praktik corporate governance yang patut dicontoh di antara perusahaan yang terdaftar secara publik, dengan penekanan khusus pada perusahaan manufaktur. Salah satu aspek krusial dalam Good Corporate Governance adalah peran dewan komisaris yang bertugas mengawasi kinerja perusahaan. Diharapkan dengan pengawasan yang efektif dari dewan komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai kebijakan dan tujuannya, meningkatkan kinerja keuangan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Peran komite audit dalam memastikan transparansi dan keakuratan laporan keuangan tidak dapat diabaikan dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG). Komite audit bertindak sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa manajemen menjalankan tanggung jawabnya secara akuntabel kepada seluruh stakeholder. Penelitian Aryani (2024) menemukan bahwa komite audit memengaruhi kualitas pelaporan keuangan

perusahaan. Hal ini menegaskan peran penting komite audit dalam meningkatkan integritas dan keandalan laporan keuangan sehingga kepercayaan investor meningkat dan kinerja keuangan perusahaan turut meningkat.

Struktur kepemilikan menggambarkan proporsi kepemilikan saham antara segi internal perusahaan dan para investor eksternal menurut Sugiarto (2009). Struktur kepemilikan di Indonesia menunjukkan karakteristik yang unik. Terdapat struktur kepemilikan dominasi ataupun institusional baik asing maupun domestik. Kepemilikan institusional suatu perusahaan yang dipegang oleh lembaga baik dana pensiun, reksa dana ataupun perusahaan investasi lainnya peran yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Biasanya investor institusional lebih aktif dalam mengawasi kinerja suatu perusahaan jika dibandingkan dengan investor individu. Selain itu, investor dengan kepemilikan institusional lebih banyak menuntut transparansi keuangan perusahaan tersebut.

Dalam penelitian Ningrum, R. A. (2024) mengidentifikasi adanya kepemilikan institusional berkontribusi signifikan dan positif terhadap hasil keuangan perusahaan, hal ini terkait dengan kemampuan institusi tersebut dalam mengontrol manajemen. Penelitian Nathanael & Paramitha (2024) mengidentifikasi dampak positif dan signifikan dari kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu terdapat konsentrasi kepemilikan pada kelompok tertentu, yaitu struktur kepemilikan manajerial seperti dewan direksi dan komisaris. Kepemilikan

manajerial dapat memotivasi manajer untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan. keputusan tersebut harus sesuai dengan keputusan *principal* dan secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan Ningrum, R. A (2024). Menurut penelitian Lestari dan Juliarto (2017) mengidentifikasi adanya kepemilikan manajerial berdampak positif dan signifikan pada kinerja keuangan. Kepemilikan manajerial menunjukkan kesinambungan antara tujuan manajer dengan pemegang saham.

Struktur kepemilikan di Indonesia berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu merupakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi karena sudah terdapat pemisahan antara pemilik (pemegang saham) dan pengelola (manajemen). Pemisahan tersebut memunculkan hubungan keagenan, yaitu relasi yang terjadi akibat adanya perjanjian atau kontra antara pemilik (*principle*) dan manajemen (*agent*) untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *principle*. Putra & Putra (2023). Pemisahan antara pemilik dan pengelola dalam suatu struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memunculkan hubungan agensi yang khas. Pemilik mengharapkan manajemen menjalankan perusahaan secara efisien dan memaksimalkan nilai perusahaan. manajer berpotensi mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan, seperti memaksimalkan remunerasi atau mempertahankan kekuasaan. Konflik kepentingan berpotensi mendorong manajer untuk bertindak oportunistik, dengan membuat keputusan yang menyimpang dari kepentingan pemegang saham. Struktur kepemilikan dan

dinamika antara manajemen dan pemegang saham secara signifikan memengaruhi kemandirian organisasi.

Perusahaan manufaktur, yang memiliki skala operasinya yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan di sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Memiliki atribusi khas yang membuat menarik untuk diteliti. Skala yang besar sering kali diiringi dengan kompleksitas operasi yang tinggi, serta kebutuhan akan modal yang signifikan, selain itu dapat melibatkan berbagai macam pemegang saham dengan kepentingan yang beragam. Kepemilikan institusional, dan manajerial berbeda-beda dalam perusahaan manufaktur dapat menciptakan dinamika kekuasaan yang menarik untuk diteliti karena dapat mempengaruhi cara perusahaan dikelola dan diarahkan. Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana keberagaman berdampak pada kinerja keuangan perusahaan manufaktur berdasarkan struktur kepemilikan.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya *research gap*, karena penelitian sebelumnya oleh Margaret & Daljono (2023), menggunakan sampel perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Sementara itu, pada penelitian ini penulis memilih Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek kajian. Fokus penelitian sebelumnya terhadap BUMN menjadi kurang relevan, mengingat perubahan signifikan dalam dunia bisnis, terutama akibat pandemi COVID-19. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik

unik dan tantangan sendiri dalam penerapan GCG, serta berperan penting dalam perekonomian nasional. Sehingga harapan penulis dengan adanya perbedaan perusahaan tersebut dapat mengkaji kembali relevansi temuan-temuan sebelumnya.

Selain itu, pada penelitian sebelumnya terdapat 6 indikator dalam penelitian yaitu dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah. Pada penelitian sekarang hanya menggunakan lima indikator, yaitu dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajer tidak menggunakan kepemilikan pemerintah. Tujuan dari pengurangan indikator pada penelitian adalah perbedaan struktur perusahaan yang digunakan oleh peneliti, perusahaan manufaktur cenderung perusahaan swasta yang tidak dikelola langsung oleh pemerintah selain itu penelitian sebelumnya lebih fokus pada hubungan antara pemerintah dan kinerja BUMN, sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada bagaimana kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap struktur keuangan non pemerintah.

Sektor manufaktur di Indonesia memiliki posisi krusial dalam perekonomian nasional. Namun, kinerja perusahaan manufaktur sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk *Good Corporate Governance*. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), yang diproksikan oleh dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit, serta struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan

institusional dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Meskipun terdapat penelitian – penelitian terdahulu yang sudah mengkaji hubungan antara *Good Corporate Governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan, hasil yang bervariasi. Menurut penelitian Margaret & Daljono (2023) dewan direksi dan kepemilikan institusional memberikan pengaruh menguntungkan terhadap ROA, sebaliknya karakteristik dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak memiliki dampak nyata pada ROA. Tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial tersebut didukung oleh penelitian Wardhani & Suwarno (2021). Namun bertentangan dengan hasil penelitian Sari dkk. (2020) mengidentifikasi kepemilikan manajerial dan komite audit mempengaruhi kinerja keuangan. Terdapat juga penelitian yang menunjukkan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan menurut Febrina & Sri (2022). Adanya hasil penelitian – penelitian terdahulu yang bervariasi, hal ini menunjukkan perlunya melakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga peneliti ingin mengkaji ulang pengaruh *Good Corporate Governance* yang terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit serta Struktur Kepemilikan yang meliputi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap Kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021- 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam literatur keuangan, penelitian terkait efek Good Corporate Governance (GCG) dan struktur kepemilikan saham terhadap kinerja keuangan perusahaan menjadi salah satu tema yang menarik untuk diuji. Namun, masih terdapat beberapa celah penelitian, terutama terkait dengan perusahaan manufaktur di Indonesia. Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori yang telah ada melalui pengujian empiris mengenai dampak variasi struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya. Dengan demikian, permasalahan penelitian yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui Return On Assets (ROA)?
2. Bagaimana dampak dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)?
5. Sejauh mana kepemilikan manajerial memengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui ROA?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memperoleh hasil nyata terkait pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) serta struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2021-2023. Selain itu, bagian kegunaan penelitian dijelaskan berdasarkan pengetahuan secara teoritis maupun praktis.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari kajian ini diantaranya :

1. Mengetahui bagaimana dewan komisaris mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui Return On Assets (ROA).
2. Menganalisis dampak dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)
3. Mengidentifikasi pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA
4. Mengevaluasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)
5. Mengukur sejauh mana kepemilikan manajerial memengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui (ROA)

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang hal – hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berdampak pada pengembangan ilmu dan teori. Penelitian ini bermanfaat teoritis sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan, khususnya pada kinerja keuangan. Karena semua perusahaan memiliki laporan keuangan, GCG diharapkan dapat berdampak positif seperti meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- b. Penelitian ini diperkirakan menghasilkan kontribusi inovatif yang dapat memperdalam pemahaman mengenai konsep dan fenomena tertentu, khususnya terkait dengan bagaimana perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan struktur kepemilikan saham mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang relevan bagi sejumlah pihak, di antaranya:

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan serta pemahaman terkait pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan

b. Bagi Pihak Perusahaan Manufaktur

Diharapkan hasil dapat digunakan sebagai evaluasi serta masukan terkait mekanisme *corporate governance* perusahaan terkait serta menjadi barometer perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan.

c. Bagi Investor

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk menentukan keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan terkait.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai wawasan dan informasi tambahan jikalau ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan topik ini, khususnya topik Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan

1.3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa bagian penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori. Tinjauan pustaka dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan - persamaan yang berkaitan dengan permasalahan lalu dituangkan dalam bentuk kerangka berpikir serta rumusan hipotesis terkait.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai definisi operasional variabel, cakupan populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis serta sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Tujuannya agar dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan terkait kesimpulan, keterbatasan, dan saran.